

**KEMAMPUAN KEPALA DESA DALAM MENGELOLA DANA DESA**  
**(Studi pada Desa Hanauberak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten**  
**Pesawaran)**



**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S.Sos  
Dalam Ilmu Ushuluddin

Oleh:

Abdul Aziz  
NPM: 1131040021

Jurusan : Pemikiran Politik Islam

Pembimbing I : Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si

Pembimbing II : Tin Amalia Fitri, S.Sos. M.Si

**FAKULTAS USHULUDDIN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**RADEN INTAN LAMPUNG**  
**1440 H/2018 M**

**ABSTRAK**  
**KEMAMPUAN KEPALA DESA DALAM MENGELOLA DANA DESA**  
**(Studi pada Desa Hanauberak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten**  
**Pesawaran)**

**Oleh**  
**ABDUL AZIZ**

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membahas dana desa sebagai upaya meningkatkan pemerataan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat. dana desa di prioritaskan untuk mendanai program kegiatan yang meliputi: Pengentasan masyarakat miskin, Peningkatan Pelayanan Kesehatan Desa, Infrastruktur Desa, dan Pertanian. Sebagai program pemerintah pusat melakukan pembangunan dimulai dari desa yang di kelola atas kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat terlibat langsung dalam pembangunan guna mewujudkan desa mandiri dan sejahtera.

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah Kinerja kepala desa Hanauberak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya memberikan pelayanan kepada masyarakat belum dilaksanakan secara maksimal. Disebabkan karena beberapa permasalahan yakni timbulnya miskomunikasi dengan lembaga BPD Hanauberak, belum adanya Peraturan Bupati, Peraturan Menteri Desa terkait pengelolaan dana desa serta belum adanya Pendamping Desa yang di tugaskan, kemudian Desa mengalami kekosongan Sekretaris Desa sehingga menghambat pelaksanaan Pemerintahan.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan interview terhadap responden yang terdiri dari para stakeholder untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan sehingga data akurat dapat diperoleh kemudian metode dokumentasi di gunakan utama untuk menggali data dokumentasi yang berkenaan dengan kondisi masyarakat terdiri dari monografi dan, demografi desa, kondisi masyarakat dan catatan-catatan tertulis yang dibutuhkan. Setelah diperoleh data yang cukup, peneliti melakukan analisa, penyajian dan verifikasi data.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dana desa di Desa Hanauberak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran tahun 2015 dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Kepala Desa dalam mengelola dana desa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi terkait pelaksanaan dana desa teknik analisis datanya adalah deskriptif , hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pengelolaan dana desa di katakan sesuai prosedur.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa, Pengelolaan Dana Desa Hanauberak *pertama*, Bahwa kepala desa Hanauberak beserta seluruh stakeholder dalam pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi, sudah sesuai sasaran dan telah memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Kedua,** Terdapat kekurangan sarana dan prasarana aparatur desa Hanauberak dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa sehingga menghambat pengelolaan dana desa. **Ketiga,** Minimnya SDM baik aparatur desa itu sendiri dan masyarakat desa Hanauberak sehingga kesadaran sebagai control sosial pada pengoptimalisasian pembangunan desa kurang.

Faktor pendukung dalam pengelolaan pembangunan desa adalah perangkat desa yang masih di golongkan berusia muda dan produktif, kondisi birokrasi yang sinergi, adanya potensi alam berupa gunung batu untuk bahan material fisik pembangunan, adanya sumber perairan dan aliran sungai yang memadai, terdapat tanaman kayu yang berguna untuk material jembat gantung serta kondisi masyarakat yang beraneka suku dan agama namun tetap rukun dalam bermasyarakat.

Faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa adalah Sumber Daya Aparatur Desa masih dikatakan minim keilmuan dan pengalaman di bidang pengelolaan dana desa. Peraturan Bupati, Permendes mengenai sosialisasi dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa belum tersosialisasi sampai ke desa serta belum adanya aparat desa yang mengikuti pelatihan khusus terkait teknis pelaksanaan pengelolaan dana desa. Kesadaran Masyarakat dan Lembaga Desa untuk berperan aktif dalam pembangunan masih kurang serta Sarana dan Prasarana desa masih belum terpenuhi seluruhnya.





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

*Alamat: Letkol Hi Endro Suratmin Sukarama Bandar Lampung Telp.(0721) 703289*

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **KEMAMPUAN KEPALA DESA DALAM MENGELOLA  
DANA DESA (Studi Pada Desa Hanauberak Kecamatan  
Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)**  
Nama : Abdul Aziz  
NPM : 1131040021  
Jurusan : Pemikiran Politik Islam  
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

**MENYETUJUI**

Untuk Dimunaqosahkan dan Dipertahankan dalam Sidang Munaqosah  
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si**  
NIP. 197503172003121003

  
**Tin Amalia Fitri, M.Si**  
NIP. 197801302011012004

Ketua Jurusan

  
**Dr. Nadirsah Hawari, MA**  
NIP. 197406282008011013





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat: Letkol Hi Endro Suratmin Sukarama Bandar Lampung Telp.(0721) 703289

**PENGESAHAN**

Skripsi Dengan Judul: **KEMAMPUAN KEPALA DESA DALAM MENGELOLA DANA DESA (Studi Pada Desa Hanauberak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)**, disusun oleh Abdul Aziz, NPM 1131040021, Jurusan Pemikiran Politik Islam, telah di ujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung pada hari Jum'at, 10 Agustus 2018, di Ruang Munaqasyah (Gedung Dekanat baru lt.3) Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.

**TIM DEWAN PENGUJI**

Ketua : Dr. Nadirsah Hawari, M.A (.....)

Sekretaris : Angga Natalia, M.I.P (.....)

Penguji Utama : Abdul Qohar, M.Si (.....)

Penguji I : Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si (.....)

Penguji II : Tin Amalia Fitri, M. Si (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama

  
**Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc. M. Ag**  
**NIP. 195808231993031001**



**MOTO**



**“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) Rahmat bagi Semesta Alam” (QS. Al Anbiya’: 107).**

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, Ku persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda tercinta Hasnan Nafis Safiudin (Nanang) dan Ibunda tersayang Saodah yang telah mendidikku dengan penuh kesabaran dan kegigihan, yang tak henti-hentinya mendo'akan aku agar berguna dan menggapai cita-cita berkat dorongan serta motivasi beliau berdualah peneliti mampu menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi. Serta mengajarkan aku banyak hal dan selalu mendo'akan keberhasilanku. Terima kasih untuk semua yang telah Ayah dan Ibu berikan selama ini, harapan besarku semoga skripsi ini menjadi salah satu hadiah indah bagi Ibunda dan Ayahanda tercinta.
2. Keluarga besar yang senantiasa mensupport dalam mencari ilmu. Paman ansor dan ristanto, kemudian bibik nunung, lastri, neli, Munah, Masroh, Rodiah, Romlah, yang selalu memberikan semangat dan mendo'akanku serta keluarga besar yang senantiasa tertawa bersamaku dikala suka, menghibur dikala duka serta mengingatkanku dikala lalai dan lupa.
3. Sahabat-Sahabat seperjuanganku angkatan 2011, terkhusus Jurusan Pemikiran Politik Islam, Organisasi HMI sebagai pelopor gerakan aktualisasi, PMII, KAMMI dan IMM serta seluruh kakak dan adik tingkat. Semua sahabat-sahabat di Fakultas Ushuluddin yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Almamater Tercinta UIN Raden Intan Lampung.
5. Almamater Tercinta Sekolah Tinggi Teknologi Nusantara (STTN) Lampung.

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Sukur kehadiran Allah swt, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Kemampuan Kepala Desa Dalam Mengelola Dana Desa (Studi Pada Desa Hanauberak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)

Shalawat teriring salam semoga senantiasa Allah Swt., limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw., yang telah mewariskan dua sumber cahaya kebenaran dalam perjalanan manusia hingga akhir zaman yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Penelitian skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Ushuluddin pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Oleh karena pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung beserta segenap Staf pimpinan dan segenap karyawan yang telah memberikan kesempatan dan bimbingan kepada peneliti selama studi.
2. Bapak Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc.M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung beserta segenap Staf pimpinan dan segenap civitas akademik yang telah memberikan kesempatan dan bimbingan kepada peneliti selama studi.
3. Bapak Dr. Nadirsah Hawari, M.A selaku ketua jurusan Pemikiran Politik Islam dan Ibu Tin Amalia Fitri, S.Sos, M.Si selaku Sekertaris Jurusan Pemikiran Politik Islam yang telah memberikan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Tin Amalia Fitri, S.Sos, M.Si selaku pembimbing II yang dengan sepenuh hati serta susah payah telah memberikan bimbingan dan pengarahan secara ikhlas dengan penuh kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini.



5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Pemikiran Politik Islam dan semua Pengajar di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
6. Keluarga Besar Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung atas di perkenankannya penulis, meminjam buku-buku literatur yang dibutuhkan.
7. Semua masyarakat di kelurahan Padang Cermin umumnya dan khususnya kepada para responden yang telah membantu untuk kemudahan dalam penelitian ini.
8. Rekan-Rekan, peserta KKN di Desa Hanauberak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, semoga menjadi pengalaman yang terindah dan silaturahmi kita tetap terjaga ..
9. Sahabat-Sahabat yang selalu memberikan kontribusi baik bagi penulis seluruh angkatan 2011 di jurusan PPI,AF,TH dan PA.
10. Sahabat seperjuangan di jurusan Pemikiran Politik Islam angkatan 2011 (Afrizal Samsu Duha, Iwan Setiawan, Diansyah, dan sahabat-sahabat yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu) terima kasih atas kebersamaan dan persahabatan yang telah terbangun selama ini semoga silaturahmi kita tetap terjaga.

Semoga amal dan jasa, bantuan dan petunjuk serta dorongan yang telah diberikan dicatat Allah Swt., sebagai amal shalih dan memperoleh Ridha-Nya., dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. Amin ya Rabbal ‘Alamin.

Bandar Lampung, Januari 2018

Peneliti,

**Abdul Aziz**  
NPM. 1131040021

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
RIWAYAT HIDUP .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv

## BAB I. PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang.....	3
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Metode Penelitian .....	7
H. Tinjauan Pustaka .....	13



## **BAB II.**

### **PENGELOLAAN DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

<b>A. Pengelolaan Dana Desa.....</b>	<b>17</b>
1. Pengertian Dana Desa .....	17
2. Tahapan Pengelolaan Dana Desa .....	19
3. Pemerintahan Desa .....	25
4. Struktur Pemerintahan Desa .....	26
<b>B. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa .....</b>	<b>30</b>
1. Pengertian.....	30
2. Tujuan Undang-Undang .....	31
<b>C. Pengelolaan Dana Desa Hanauberak.....</b>	<b>33</b>

## **BAB III.**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

<b>A. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Hanauberak.....</b>	<b>37</b>
<b>B. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Hanauberak.....</b>	<b>42</b>
<b>C. Kondisi Pelayanan Aparat Desa Hanauberak .....</b>	<b>45</b>

## **BAB IV.**

### **KEMAMPUAN PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA HANAUBERAK**

<b>A. Kepala Desa Dalam Mengelola Dana Desa Di Desa Hanauberak .....</b>	<b>47</b>
<b>B. Faktor-Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Desa Hanauberak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Dalam Mengelola Dana Desa .....</b>	<b>51</b>

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

**A. Kesimpulan .....62**

**B. Saran .....63**

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**





## **DAFTAR TABEL**

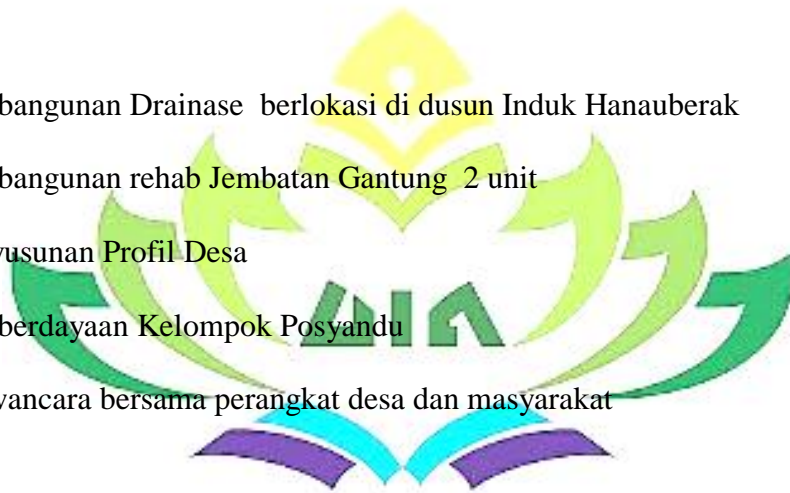
### **Tabel**

#### **Halaman**

1. Tabel Urutan Pejabat Kepala Desa Hanau Berak 40
2. Tabel Daftar Nama Aparatur Desa Hanauberak Kecamatan Padang Cermin  
Kabupaten Pesawaran 41
3. Bagan Struktur Pemerintahan Desa Hanauberak Kecamatan Padang  
Cermin Kabupaten Pesawaran 43
4. Tabel Orbitasi Desa Hanuberak 44
5. Tabel Penduduk Desa Hanauberak Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun  
2015 46

## DAFTAR GAMBAR

1. Pembangunan Drainase berlokasi di dusun Induk Hanauberak
2. Pembangunan rehab Jembatan Gantung 2 unit
3. Penyusunan Profil Desa
4. Pemberdayaan Kelompok Posyandu
5. Wawancara bersama perangkat desa dan masyarakat





## DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Lampiran I : Pedoman Wawancara

Daftar Lampiran II : Daftar Nama Informan

Daftar Lampiran III : Daftar Dokumentasi

Daftar Lampiran IV : Surat Keputusan Judul Skripsi

Daftar Lampiran V : Surat Izin Penelitian Universitas Islam Negeri Raden  
Intan Lampung

Daftar Lampiran VI : Surat Izin Penelitian Kesatuan Bangsa Dan Politik  
Provinsi Lampung

Daftar Lampiran VII : Surat Izin Penelitian Kantor Desa Hanauberak

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal dalam memahami dan menghindari kesalahpahaman skripsi ini, penulis menjelaskan terlebih dahulu maksud dari skripsi ini. Judul yang penulis angkat adalah, ***KEMAMPUAN KEPALA DESA DALAM MENGELOLA DANA DESA (Studi Pada Desa Hanauberak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)***. Kemampuan Kepala Desa Dalam Mengelola Dana Desa adalah kesanggupan, kecakapan, atau berupa kekuatan kepala desa dalam mengelola dana desa.<sup>1</sup>.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>2</sup>

Dana Desa tersebut kemudian digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Kemasyarakatan. Dengan demikian, pendapatan Desa yang bersumber dari Anggaran Pembelanjaan Negara juga digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut. Selanjutnya Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sendiri sesuai dengan kebutuhan Desa. Hal itu berarti Dana Desa akan digunakan untuk

---

<sup>1</sup> Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta : Balai Pustaka, Cetakan Ke Empat, Edisi III, 2002), h.707

<sup>2</sup> Visi Yustisia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*, (Jakarta: Visimedia, 2015)h.9

mendanai keseluruhan kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Dana Desa tersebut.<sup>3</sup>

Kepala Desa adalah kepala Pemerintahan Desa /Desa adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa, mempunyai peran penting sebagai kepanjangan tangan Negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Penyebutan Kepala Desa disesuaikan dengan sebutan lokal daerah.

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa/Desa adat dan sebagai pemimpin masyarakat yang dipilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat. Desa Hanauberek berada di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dengan luas wilayah 1800 Ha terdiri dari 8 dusun.<sup>4</sup>

Berdasarkan penegasan istilah-istilah tersebut, maksud judul skripsi ini adalah mampu tidaknya kepala desa dalam mengelola dana desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang dilaksanakan di Desa Hanauberek Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran tahun 2015.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Alasan penulis mengambil judul penelitian ini adalah :

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang di dalamnya membahas dana desa sebagai upaya meningkatkan pemerataan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat, di perlukan sebagai langkah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah yang pelaksanaanya harus sesuai ketentuan dan juga tepat sasaran.

---

<sup>3</sup>*Ibid*, h.17

<sup>4</sup> Buku Profil Desa Hanauberek Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, h. 7



2. Pembahasan pembangunan dan kesejahteraan sosial merupakan pembahasan yang sangat berhubungan dengan politik. Oleh karena itu penulis bermaksud membahas judul skripsi ini karena berkaitan dengan Prodi Pemikiran Politik Islam.
3. Kajian tentang Kemampuan Kepala Desa Dalam Mengelola Dana Desa, di lakukan untuk memperluas pemahaman dan wawasan serta merefleksikan peraturan undang-undang dan pelaksanaan dalam kehidupan sosial masyarakat.

### **C. Latar Belakang Masalah**

Percepatan pembangunan secara merata sampai kedaerah dari tahun ke tahun menjadi agenda terpenting yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, ini sebagai dasar untuk menyentuh kesejahteraan yang luas dan di rasakan oleh masyarakat hingga pelosok secara cepat, terlihat dari usaha Pemerintah secara spesipik menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan terkait, di dalamnya terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, dalam proses hingga terlahirnya undang-undang ini begitu menyita perhatian besar masyarakat dikarnakan Undang-Undang ini menerangkan pembangunan di mulai dari desa.<sup>5</sup>

Sehingga pembangunan berjalan cepat dan menyeluruh, bahkan pada momentum pelaksanaan pilpres 2014 hal terkait menjadi senjata khusus calon Presiden mengangkat Desa sebagai kebijakannya ketika terpilih dengan menggelontorkan dana 1,4 Miliar untuk setiap Desa.

---

<sup>5</sup> Antono Herry, "Kesiapan Desa Menghadapi Implementasi Undang-Undang Desa Tinjauan Desantralisasi Fiskal Dan Peningkatan Potensi Desa". *Jurnal Ilmiah Civis*, Vol. 5, No 1 (Januari 2015)

Upaya meningkatkan pemerataan kesejahteraan dan pembangunan oleh Pemerintah sangat di perlukan sebagai langkah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, hal ini sesuai dengan Hadits dari Ibnu Umar RA., bahwa Rasulullah SAW bersabda :

*Seorang islam dengan saudara muslim lainnya; tidak menganiaya dan tidak melahirkan diri dari bahayanya. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah tentu akan memenuhi kebutuhannya. Dan barangsiapa yang meringankan satu beban penderitaan saudaranya, maka Allah akan meringankan satu beban penderitaan diantara penderitaan- penderitaannya di hari kiamat. Dan barangsiapa yang menutupi kesalahan seorang islam, maka Allah akan menutupi kesalahan (dosa)nya di hari kiamat.*<sup>6</sup>

Tanggung jawab pemerintah dalam upaya pemerataan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat terkait dana desa dapat di lihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 pada pasal 21 ayat 1 yang menerangkan bahwa dana desa di prioritaskan untuk mendanai program kegiatan yang meliputi: Pengentasan masyarakat miskin, Peningkatan Pelayanan Kesehatan Desa, Infrastruktur Desa, dan Pertanian<sup>7</sup>

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 pada pasal 21 ayat 1 pada bagian kedua pasal 12 menerangkan bahwa berdasarkan besaran Dana Desa setiap Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (8), Bupati/Walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di

---

<sup>6</sup> Abbas S.Ziyad, *Pilihan Hadits Politik, Ekonomi & Sosial*, (Jakarta, Pustaka Panjimas, 1991), h.13

<sup>7</sup> Visi Yustisia, *Op Cit*, h.27.

wilayahnya<sup>8</sup>. Kabupaten Pesawaran adalah salah satu Kabupaten Kota yang diberikan tanggung jawab oleh Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi untuk melaksanakan program dan pengawasan terhadap keberlangsungan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Kinerja aparat Pemerintah Desa Hanauberak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya memberikan pelayanan kepada masyarakat belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini disebabkan karena beberapa permasalahan yakni timbulnya miskomunikasi dengan lembaga BPD Hanauberak, belum adanya Peraturan Bupati, Peraturan Menteri Desa terkait pengelolaan dana desa serta belum adanya Pendamping Desa yang di tugaskan.

Desa mengalami kekosongan Sekretaris Desa sehingga menghambat pelaksanaan Pemerintahan, kemudian belum lengkapnya sarana dan prasarana desa. Pentingnya peran pemerintah Kabupaten serta koordinasi Pemerintah Provinsi Lampung hingga Pemerintah Pusat dalam mengawal pelaksanaan program Dana Desa.

Latar belakang di atas menarik peneliti untuk mengkaji tentang Kemampuan Kepala Desa Dalam Mengelola Dana Desa sebagai langkah untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan pembangunan di Desa Hanuberak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.`

---

<sup>8</sup> Ardi Hamzah, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera, Dan Partisipatoris*, (Yogyakarta: pustaka jawa, 2015), hlm 53.



#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, permasalahan yang penulis rumuskan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana kemampuan Kepala Desa Hanauberak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dalam mengelola Dana Desa yang dilaksanakan tahun 2015?
2. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat Desa Hanauberak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dalam mengelola Dana Desa ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Berkenaan dengan itu, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Dana Desa yang dilaksanakan di Desa Hanauberak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran tahun 2015.
2. Untuk mengetahui faktor apa yang mendukung dan menghambat Desa Hanauberak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dalam mengelola Dana Desa.

## F. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa untuk menambah wawasan kajian ilmiah yang berkaitan dengan Ilmu Pemerintahan. Ilmu politik dalam hal menjalankan kebijakan berdasarkan perundang-undangan serta mampu menunjang Jurusan Pemikiran Politik Islam dalam memperluas khazanah keilmuan yang ada.
2. Secara praktis, penelitian ini kedepannya dapat membuka cakrawala pikir berkenaan dengan tatakelola Dana Desa sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa secara baik dan tepat sehingga mampu memberi sumbangsih bagi generasi maupun para pemimpin yang bersinggungan langsung dengan Pemerintahan Desa.

## G. Metode Penelitian

Metode adalah cara tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksaman untuk mencapai tujuan.<sup>9</sup> Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis,<sup>10</sup> sedangkan penelitian adalah memikirkan yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan data dan penafsiran fakta-fakta”. Jadi metode penelitian adalah

---

<sup>9</sup>Cholid Nurboko dan Ahmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1997),

<sup>10</sup> Usman Husain, Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000),h

cara ilmiah untuk mendapatkan data secara sistematis dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>11</sup>

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini,<sup>12</sup> maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di lakukan penulis termasuk dalam penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya.<sup>13</sup> Penelitian ini dilakukan terhadap kemampuan kepala Desa dalam mengelola Dana Desa yang dilaksanakan di Desa Hanauberak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

### b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu suatu penelitian untuk mengetahui, menjelaskan, mengolah, menafsirkan fenomena sosial tertentu dan mendeskripsikan secara terperinci fenomena tertentu. Penelitian ini akan mendeskripsikan Kemampuan Kepala Desa dalam Mengelola Dana Desa yang dilaksanakan di Desa Hanauberak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

---

<sup>11</sup> Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014),

<sup>13</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metode Penelitian Riset Sosial.*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h.32



## 2. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif yang lebih di tekankan adalah aspek kualitas data dan proses kegiatan objek yang akan diteliti. Maka memerlukan sumber data yang benar-benar bisa menjelaskan masalah dalam penelitian.

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukanya.<sup>14</sup> Data primer hasil wawancara diperoleh dari orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, dalam hal ini Kepala Desa/Lurah, Sekretaris desa, perangkat desa yang berjumlah 9 orang, anggota BPD berjumlah 3 orang, dan masyarakat berjumlah 13 orang.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah jadi atau dipublikasikan untuk umum oleh instansi atau lembaga yang mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan. Data sekunder disebut juga data tersedia.<sup>15</sup> data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer yang diperoleh dari buku-buku, literatur, dan dokumentasi terkait objek penelitian. Dalam data sekunder peneliti menggunakan buku-buku Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Terkait, buku Penjelasan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 Tentang

---

<sup>14</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2002), h. 81

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 92

Dana Desa, Buku Tentang Akuntansi Desa Paduan Tata Kelola Keuangan Desa dan arsip kegiatan pelaksanaan dana desa serta dokumen yang terkait dengan judul penelitian untuk melengkapi data primer.

Kemudian data tersebut dipergunakan saling melengkapi, karena data yang ada di lapangan tidak akan sempurna apabila tidak ditunjang dengan data kepustakaan. Dengan menggunakan kedua sumber data tersebut maka data yang diperoleh dapat memberikan kejelasan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah :

#### a. Metode Interview

Metode interview adalah metode penelitian di mana suatu proses Tanya jawab, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik yang satu dapat melihat yang lain dan dapat mendengarkan dengan telinga sendiri.<sup>16</sup> Dalam pelaksanaannya jenis interview yang di gunakan adalah interview bebas terpimpin yaitu penginterview membawa kerangka pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan irama interview diserahkan sepenuhnya kepada penginterview.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini penulis wawancara langsung dengan Bapak Mirza Gulam Ahmad selaku Kepala Desa, Bapak Rudi Selaku Sekretaris Desa, Bapak Baheramsah selaku

---

<sup>16</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1, (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM 1982), hlm. 3

<sup>17</sup> Koenjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Edisi ke III., (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 1983), h. 44

Ketua BPD, tokoh masyarakat Alamsyah, Bapak Paryo selaku tokoh pemuda.

Interview diajukan kepada sample dari masyarakat di Desa Hanubarak. Metode interview yang digunakan sebagai metode untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan sehingga data akurat dapat diperoleh. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang Kemampuan Kepala Desa dalam Mengelola Dana Desa yang dilaksanakan di Desa Hanaubarak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.<sup>18</sup> Metode dokumentasi yang digunakan sebagai metode utama untuk menggali data dokumentasi yang berkenaan dengan kondisi masyarakat tentang persepsi yang terdiri dari monografi dan, demografi desa, kondisi masyarakat dan catatan-catatan tertulis yang dibutuhkan.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan, maka langkah berikutnya adalah mengumpulkan data dan mengolah data yang sudah di kumpulkan dengan cara menggambarkan, mengklasifikasikan kata-kata (jawaban) tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati tanpa menggunakan perhitungan. “ atas dasar pertimbangan itulah maka kemudian

---

<sup>18</sup> Suharsini Arikunto, *Loc-Cit*, hlm 206



penelitian kualitatif tampaknya diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan”.<sup>19</sup> Selanjutnya dilakukan pengelompokan data untuk ditafsir dan diambil pengertian sebenarnya dan analisa yang dilakukan akan ditarik kesimpulan akhir guna memberikan jawaban terhadap masalah yang berkaitan dengan Kemampuan Kepala Desa dalam Mengelola Dana Desa yang dilaksanakan di Desa Hanauberak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

## 5. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul melalui metode pengumpulan data, maka data perlu dianalisis guna memperoleh data yang akurat serta valid. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam analisa data adalah sebagai berikut :

### a. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Di cari tema pokoknya, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya bila diperlukan.<sup>20</sup>

### b. Penyajian Data

Setelah data di reduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat

---

<sup>19</sup>Lexy J.Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, ,1988), h. 2

<sup>20</sup> Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakart: Pustaka Pelajar, 1998), hlm.6

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori.<sup>21</sup>

#### c. Verifikasi Data

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dari verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.<sup>22</sup>

Untuk menarik kesimpulan penulis menggunakan analisis pendekatan induktif. Adapun analisis induktif yaitu cara menganalisa data dengan mengangkat fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang kongkrit itu di tarik kesimpulan yang mempunyai sifat umum.<sup>23</sup>

#### H. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis, belum ada judul karya ilmiah yang serupa yang penulis temukan dengan judul Kemampuan Kepala Desa Dalam Mengelola Dana Desa, Studi pada Desa Hanauberak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. Namun ada beberapa karya ilmiah yang memiliki tema tentang Kemampuan Desa Dalam Melakukan Pembangunan :

Skripsi dengan judul Peran Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Babakan Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus oleh Adib Ridho Ardyan, jurusan Pemikiran Politik Islam, Fakultas

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm 7.

<sup>22</sup> *Ibid.*, him. 8.

<sup>23</sup> Moersaleh dan Moersanif, *Op.Cit*, hlm. 116.

Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung tahun 2015. Fokus kajian pada upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam rangka mensejahterakan masyarakat khususnya dalam bidang kesehatan yang ada di Desa Babakan Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.

Skripsi dengan judul Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Kepala Desa di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah . oleh Merlindasari jurusan Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung tahun 2016 dengan konsentrasi pada permasalahan kinerja Kepala Desa dan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta bertujuan untuk mengetahui kinerja

Kepala Desa selama menjabat sebagai aparatur Desa di kecamatan terbanggi besar dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja Kepala Desa. Dapat diketahui keberhasilan Desa Dalam Mengelola dan Mengembalikan Pinjaman dari Pemerintah menjelaskan keberhasilan desa menjadi desa mandiri dan pelaksanaan program PNPM yang berhasil.

Skripsi dengan judul Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Islam. Oleh Raditia Saputra jurusan Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung tahun 2015 Studi di kecamatan sukrame Bandar lampung yang dilatar belakangi oleh realita kurangnya pemahaman dan kesadaran pentingnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan serta nilai-nilai ajaran islam.

Kajian ini menunjukan bahwa pemberdayaan masyarakat muncul karena adanya suatu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah mengakibatkan

mereka tidak mampu dan tidak tahu. Kemudian selanjutnya Implementasi Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif islam melalui PNPM harus sesuai dengan peraturan pemerintah dan dilaksanakan sebaik-baiknya. Karena anjuran dalam islam memerintahkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. pelaksanaan program PNPM harus sesuai dengan keadaan lingkungan semestinya harus diberdayakan, untuk itu islam memberikan aturan dasar moril untuk dapat melaksanakan program PNPM bagi kepentingan rakyat.

Tesis dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ( Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo kabupaten Temanggung Tahun 2008 ). Oleh Agus Subroto Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang tahun 2009.

Penelitian ini memfokuskan perhatian pada penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan tujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa, sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan.

Sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala utamanya adalah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan kompetensi sumber daya manusia,



sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah secara berkelanjutan.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti dengan judul Kemampuan Kepala Desa Dalam Mengelola Dana desa ialah berkonsentrasi pada kemampuan Kepala desa dalam pengelolaan dana desa yang sesuai dengan Tata Kelola Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 tentang desa dan peraturan terkait. Sehingga aparat desa dapat terlibat langsung dengan memaksimalkan potensi sumberdaya manusianya agar menjadi lebih mandiri dan berperan aktif dengan mewujudkan cita-cita pembangunan dimulai dari desa, dengan tujuan mensejahterakan masyarakat dengan memberikan pelayanan terbaik.

## **BAB II**

### **PENGELOLAAN DANA DESA MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014**

#### **A. Pengelolaan Dana Desa**

##### **1. Pengertian Dana Desa**

Dana Desa merupakan program Pemerintah Pusat untuk melakukan pembangunan dimulai dari desa dengan dana yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>24</sup>

Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2014 sebagai payung hukum yang mengatur tentang pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Menerangkan bahwa Desa mempunyai sumber pendapatan berupa Pendapatan Asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, kemudian bagian dari dana perimbangan keuangan pusat ke daerah yang di terima oleh Kabupaten/Kota.

Alokasi anggaran dari Anggaran Pembelanjaan Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pembelanjaan Negara, Propinsi dan Anggaran Pembelanjaan Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga selain Pemerintah.

---

<sup>24</sup>Visi Yustisia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*, (Visimedia, Jakarta, 2015), h .252

Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya kepada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing Desa.

Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana transfer daerah secara bertahap.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan Desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Desa.

Dana Desa di dalam APBN 2015 dianggarkan sebesar Rp 9.066,2 miliar, namun sejalan dengan visi Pemerintah untuk Membangun Indonesia dari pinggiran dalam kerangka NKRI maka anggaran ini ditambah alokasinya di

dalam APBN-P 2015 menjadi Rp 20.766,2 miliar. Sedangkan pada tahun anggaran 2016 Dana Desa dialokasikan sebesar Rp. 46.982 miliar.<sup>25</sup>

Dana desa ini dialokasikan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Dana Desa dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan pada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah pada desa yang selama ini sudah ada.

## **2. Tahapan Pengelolaan Dana Desa**

### **A. Perencanaan**

**Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten dan Kota. Rencana pembangunan Desa di susun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam hal ini perencanaan pembangunan drainase Desa Hanauberak, mekanisme perencanaan menurut permendagri No. 113 tahun 2014 sebagai berikut :**

- 1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa.

---

<sup>25</sup>Desa <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/03/25/dana-desa-guna-pembangunan-indonesia-yang-lebih-baik>. Diakses Kamis, 17-05-2018 Pukul 10:23.



- 2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat dalam musdes bersama untuk pembahasan lebih lanjut.
- 3) Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- 4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau sebutan lain.
- 5) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- 6) Jika Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- 7) Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

- 8) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- 9) Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- 10) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.<sup>26</sup>

## **B. Pelaksanaan**

**Dalam pelaksanaan Anggaran Desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran Desa. Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan Perbankan diwilayahnya maka pengaturanya di tetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus di dukung oleh bukti yang lengkap dan sah.**

**Dalam realisasi pelaksanaan dana desa tahun 2015 Desa Hanauberak membangun drainase sepanjang 259 m terletak di Dusun Induk Hanauberak serta rehab 2 unit jembatan gantung penghubung dusun.**

---

<sup>26</sup>V Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa Panduan Tatakelola Keuangan Desa*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h.18-21.

**Beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa :**

- 1) Pemerintah desa di larang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang di tetapkan dalam pereaturan desa.**
- 2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan oprasional pemerintah desa.**
- 3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa di tetapkan dalam peraturan bupati atau walikota.**
- 4) Penegeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat di lakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang apbdesa di tetapkan menjadi peratran desa.**
- 5) Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang baersifat mengikatdan oprasional perkantoran yangdi tetapkkn dalam peraturan kepala desa.**
- 6) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus di buat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepela desa.**
- 7) Pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.**
- 8) Pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada kepala desa. Surat permintaan pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima. Penegjuan spp**

terdiri atas surat permintaan pembayaran, pernyataan tanggungjawab belanja dan lampiran bukti transaksi.

- 9) Bendaha desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang di pungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **C. Penatausahaan**

Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan Keuangan Desa harus menetapkan Bendahara Desa. Penetapan Bendahara Desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan Kepala Desa.

Bendahara merupakan Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan Keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDes, anggaran yang di terima desa pada tahun 2015 sebesar Rp. 364.356.996. menurut Permendagri No. 113 tahun 2014 laporan Pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh Bendahara Desa adalah :

#### **1) Buku Kas Umum**

Buku Kas Umum di gunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran Kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi Perbankang atau kesalahan dalam pembukuan. Buku Kas Umum dapat dikatakan sebagai sumber Dokumen Transaksi.

**Buku Kas Pembantu Pajak. Buku Pajak digunakan untuk membantu Buku Kas Umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan Pajak.**

**2) Buku Bank**

**Buku Bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang Bank.**

**D. Pelaporan**

Menurut Permendagri No 113 tahun 2014 dalam, pelaksanaan tugas kewenangan, hak, dan kewajiban, Kepala Desa wajib :

1. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan pelaksanaan APBDDesa kepada bupati/walikota berupa :
  - a) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
  - b) Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota.
3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
4. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.



## **E. Pertanggungjawaban**

Permendagri No 113 tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari :

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.<sup>27</sup>

Anggiat M.Sinaga dan Sri Hadiati lebih mendefinisikan kemampuan lebih pada keefektifan orang tersebut dalam melakukan segala macam pekerjaan. Yang artinya kemampuan merupakan dasar dari seseorang tersebut melakukan sebuah pekerjaan secara efektif dan efisien.<sup>28</sup>

### **3. Pemerintahan Desa**

#### **1. Definisi Pemerintah Desa**

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>29</sup>

Pemerintahan dalam pengertian yang sempit ialah segala aktivitas, tugas, fungsi, dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga yang berwenang mengelola

---

<sup>27</sup> *Ibid.* h. 24.

<sup>28</sup> Abdul Chaer, *Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.3

<sup>29</sup> Tim Visi Yustia, *Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Terkait*, (Jakarta: Visimedia, 2015), h.3.

dan mengatur jalannya sistem Pemerintahan Negara untuk mencapai tujuan Negara. Pada prakteknya Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia tidak seragam. Seperti adanya Gampong di Aceh, nagari di Sumatera Barat, marga di Palembang, dan Banjar, di Bali memperlihatkan warna lain Pemerintahan Desa.

Upaya penyeragaman itu akhirnya membuat Desa tidak mandiri. Kini, lewat UU Desa, Pemerintah dan DPR berupaya mengembalikan kemandirian Desa dan pengakuan terhadap Desa berdasarkan asal usul. Dalam UU Desa (UU No. 6 Tahun 2014), materi tentang Pemerintahan Desa terutama diatur pada pasal 23-66. Undang-Undang Desa memperjelas asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang menjadi prinsip/nilai dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa.<sup>30</sup>

Pemerintah Desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat Desa. Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun [2005](#) tentang Pemerintahan Desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pimpinan Pemerintah Desa, seperti tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1), adalah Kepala Desa yang bertugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>Widjaja, HAW, *Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.17

<sup>31</sup>Argama, Rizki, *Konstitusi Dan Pemerintahan*, (Yogyakarta: Media Perkasa, 2006), h.56

## **2. Struktur Pemerintahan Desa**

### **a. Kepala Desa**

Kepala Desa merupakan orang yang berkedudukan sebagai kepala Pemerintah di Desa. Kedudukan Kepala Desa berada langsung di bawah Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.<sup>32</sup> Fungsi dan tugas dari Kepala Desa adalah memimpin penyelenggaraan Pemerintahan serta pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan Desa.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Kepala Desa diberikan beberapa wewenang seperti yang tercantum dalam PP no. 72 tahun 2005, seperti :

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
2. Mengajukan rancangan Peraturan Desa
3. Menetapkan peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD

### **b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

BPD merupakan suatu lembaga tingkat Desa yang anggotanya terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku adat, golongan profesi, pemuka Agama, serta tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa yang bersangkutan yang

---

<sup>32</sup>Agus Dwiyanto, *Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan Dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, 2003), h.31

dipilih dalam musyawarah mufakat dan masa jabatan dari anggota BPD adalah 6 tahun.<sup>33</sup>beberapafungsi BPD, diantaranya :

1. Menetapkan peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

### **c. Sekretaris Desa**

Kedudukan dari Sekretaris Desa adalah sebagai unsur staf yang membantu Kepala Desa serta memimpin Sekretariat Desa. Adapun tugas utama dari seorang Sekretaris Desa adalah membantu tugas Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan yang meliputi administrasi, kepegawaian, keuangan, umum, perlengkapan, perencanaan, evaluasi, serta laporan.<sup>34</sup>

#### **1. Tugas Sekretaris Desa**

- a) Mengkoordinir serta menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan keuangan Desa.
- b) Memberikan pelayanan administrasi untuk pemerintah desa dan masyarakat.<sup>35</sup>

### **d. Kepala Urusan Pemerintahan**

Kedudukan Kepala Urusan Pemerintahan adalah sebagai unsur sekretariat, yang melalui Sekretaris Desa, ia memiliki tanggung jawab terhadap Kepala Desa.<sup>36</sup>Fungsi Kepala Urusan Pemerintahan :

---

<sup>33</sup>Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2005), h. 159

<sup>34</sup>Ndraha, Taliziduhu, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h.47

<sup>35</sup>*Ibid*, h. 49.

<sup>36</sup>*Ibid.*, h. 53.

- a) Sebagai pelaksana kegiatan pemerintahan desa
- b) Sebagai pelaksana kegiatan dalam bidang ketentraman serta ketertiban masyarakat
- c) Sebagai pelaksana tugas-tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh kepala desa
- d) Sebagai pelaksana kegiatan perencanaan pemerintahan desa

#### **e. Kepala Urusan Pembangunan**

Kepala Urusan Pembangunan merupakan salah satu unsur Sekretariat Desa yang memiliki tanggung jawab terhadap Kepala Desa melalui Sekretaris

Desa.<sup>37</sup>Tugas Kepala Urusan Pembangunan :

- a) Sebagai pembantu dalam pelaksanaan tugas-tugas Kepala Desa baik di bidang teknis maupun administrasi
- b) Membantu pembinaan perekonomian desa
- c) Mengajukan pertimbangan terkait rancangan peraturan desa maupun hal-hal yang menyangkut pembangunan desa kepada Kepala Desa
- d) Menggali serta memanfaatkan potensi desa

#### **f. Kepala Urusan Umum**

Kepala Urusan Umum juga merupakan bagian struktur organisasi Pemerintahan Desa yang ikut berperan penting untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar. Tugas Kepala Urusan Umum :

- b) Membantu tugas Kepala Desa dibidang teknis maupun administrasi Pemerintahan Desa.

---

<sup>37</sup>*Ibid.*, h. 55.



- c) Memberikan pelayanan umum serta tugas surat menyurat.
- d) Melakukan pemeliharaan dan pelestarian aset-aset Pemerintah.
- e) Melaksanakan tugas terkait urusan keuangan dan laporan.<sup>38</sup>

#### **g. Kepala Dusun**

Kedudukan Kepala Dusun adalah sebagai unsur kewilayahan yang membantu pelaksanaan tugas dari Kepala Desa di lingkup kerjanya. Adapun tugas dari Kepala Dusun adalah membantu Kepala Desa dalam menjalankan kebijakan serta kegiatan di bidang Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan, serta kemasyarakatan. Fungsi Kepala Dusun :

- a) Sebagai pelaksana kegiatan Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan, serta kemasyarakatan di wilayah kerjanya
- b) Sebagai pelaksana peraturan desa di wilayah kerjanya
- c) Sebagai pelaksana kebijakan desa

#### **h. Pamong**

Kedudukan Pamong adalah sebagai unsur pelaksana teknis lapangan guna membantu Kepala Desa dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya di lapangan.<sup>39</sup> Fungsi Pamong antara lain adalah :

- a) Sebagai pelaksana kegiatan dan keputusan desa
- b) Pelaksana kebijakan Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya di lapangan.

### **B. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

#### **1. Pengertian**

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa ini merupakan penegasan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di

---

<sup>38</sup>Subiakto Henry, Ida Rachmah . *Otonomi , Dan Pemerintahan Desa*. (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2012), h.49-53

<sup>39</sup> Nurcholis, Hanif, *Op. Cit.* h. 61-63.

dasarkan atas pancasila, undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, asas Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.

Dengan demikian, secara lebih lengkap undang-undang ini berisi materi mengenai kedudukan dan jenis desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan desa dan aset desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, serta peraturan lain yang terkait, yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan saat ini.<sup>40</sup>

Keberagaman karakteristik dan jenis desa di Indonesia, menggambarkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Dimana desa adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan desa, pembangunan desa, serta mendapat fasilitasi dari pemerintah Kabupaten/Kota serta mendapat perlakuan sama dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.<sup>41</sup>

## 2. Tujuan Undang-Undang

Pemerintah Negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan demikian tujuan ditetapkan penagaturan desa dalam undang-undang ini merupakan penjabaran lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam pasal

---

<sup>40</sup>Visi Yustisia, *Op.Cit.* hlm. 13.

<sup>41</sup>Kencana Syaferi, *Birokrasi dan Ilmu Politik*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996), hlm. 118

18 ayat (7) dan pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu :

- 1) Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara kesatuan republik Indonesia.
- 2) Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam system ketatanegaraan republic Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 3) Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa
- 4) Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyaakat desa untuk pengembangan potensi daan asset desa guna kesejahteraan bersama.
- 5) Membentuk pemeruntahan desa yang propesional, efesien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab.
- 6) Meningkatkan pelayanan public bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesehteraan umum.
- 7) Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.
- 8) Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mangatasi kesenjangan pembangunan nasional.
- 9) Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

## C. Pengelolaan Keuangan Desa

### 1. Konsep Kemampuan Kepala Desa dan Aparat Desa

Istilah kemampuan mempunyai banyak makna, Jhonson dalam (CWijaya,1991:3) berpendapat bahwa kemampuan adalah perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai kondisi yang diharapkan.<sup>42</sup>Sementara itu, menurut Kartono (1993:13) bahwa “kemampuan adalah segala daya, kesanggupan, kekuatan dan keterampilan teknik maupun sosial yang dianggap melebihi dari anggota biasa.”

Mengacu pada pengertian dan jenis kemampuan tersebut di atas, maka dalam suatu organisasi Pemerintahan Desa senantiasa perlu memiliki suatu daya kesanggupan, keterampilan, pengetahuan terhadap pekerjaan dalam pengimplementasian tugas-tugas dan fungsi masing-masing aparat Desa.<sup>43</sup>Kemampuan yang penulis maksudkan adalah kemampuan yang dilihat dari hasil kerjanya atau kemampuan kerjanya.

Sementara itu, menurut Steers dalam (Rasyid,1992:6) bahwa "kemampuan aparatur pemerintah sebenarnya tidak terlepas dari pembicaraan tingkat kematangan aparatur yang didalamnya menyangkut keterampilan yang diperoleh dari pendidikan latihan dan pengalaman”.

Berdasarkan pandangan tersebut jelas bahwa kemampuan seseorang, dalam hal ini aparat desa dapat dilihat dari tingkat pendidikan aparat, jenis latihan yang pernah diikuti dan pengalaman yang dimilikinya.Secara konsepsional diperkuat

---

<sup>42</sup>Lukman, Sampara. *Manajemen Kualitas Pelayanan*, (Jakarta: STIA-LAN Press, 2005),h. 23

<sup>43</sup>Basri Amaluddin, *Administrasi Pembangunan Untuk Pembangunan Desa*,(Bekasi: Akademi Pembangunan Desa. 1982), h. 32

dengan mengidentifikasi kegiatan dalam organisasi dapat mencapai tujuannya salah satunya yang harus mendapat perhatian adalah orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut.

Pemerintahan Desa di dalam kepemimpinannya terdapat budaya dan tradisi paternalistik yang memposisikan Kepala Desa sebagai orang kuat dan berpengaruh masih melekat. Realitas ini memang tidak dapat dilepaskan sebagai bagian dari proses konstruksi sosial yang begitu mendalam sehingga membuat sikap warga desa seringkali terasa kesulitan dalam membuat terobosan-terobosan baru yang sejalan dengan semangat perubahan ketika berbenturan dengan kebijakan seorang Kepala Desa.<sup>44</sup>

### **3. Administrasi Pemerintahan Desa**

#### **a). Pengertian Administrasi**

Secara etimologis, administrasi berasal dari kata *Ad-* dan *ministrate* yang berarti melayani, membantu, memenuhi, melaksanakan, menerapkan, mengendalikan, mengelola, mengatur serta mendayagunakan.<sup>45</sup>

Menurut Widjaja, menyatakan administrasi sebagai perbuatan penyelenggaraan setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>46</sup>

Menurut Gie, administrasi adalah segenap rangkaian penataan terhadap pekerjaan pokok yang di lakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama

---

<sup>44</sup>Rahardjo, *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999), h.60

<sup>45</sup>Liang Gie, *The, Kamus Administrasi*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 2001), h. 18

<sup>46</sup>Widjaja, AW, *Pemerintahan dan Administrasi Desa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 17

mencapai tujuan tertentu.<sup>47</sup> Administrasi juga dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang terutama bersangkutan dengan cara untuk menyelenggarakan tujuan yang telah ditentukan semula sebagai suatu proses lazim terdapat dalam segenap usaha bersama, baik usaha berskala besar maupun kecil.

#### b). Administrasi Pemerintah Desa

Administrasi Pemerintah Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Desa.<sup>48</sup>

Administrasi Pemerintah Desa adalah segenap usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Desa guna memenuhi atau menjalin terlaksananya kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh pihak atas, dan juga kegiatan dalam rangka menetapkan dan melaksanakan penyelenggaraan urusan rumah tangga yang bersangkutan.<sup>49</sup> Ndaraha, 2002, administrasi Pemerintah Desa merupakan usaha yang dilakukan untuk memenuhi terlaksananya kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dalam rangka menetapkan dan melaksanakan penyelenggaraan urusan rumah tangga.<sup>50</sup>

Dengan demikian maka administrasi Pemerintah Desa adalah semua kegiatan yang bersumber pada wewenang Pemerintah Desa, yang terdiri atas

---

<sup>47</sup>Liang Gie. *Op. Cit.* h.27

<sup>48</sup>[http://www.tribunnews.com/nasional/2018/03/25/Peraturan\\_Menteri\\_Dalam\\_Negeri\\_Nomor\\_32\\_Tahun\\_2006](http://www.tribunnews.com/nasional/2018/03/25/Peraturan_Menteri_Dalam_Negeri_Nomor_32_Tahun_2006). Diakses Kamis, 17-05-2018 Pukul 11.00

<sup>49</sup>Silalahi, Ulbert, *Studi Tentang Ilmu Administrasi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007), h.15

<sup>50</sup>Ndraha, Taliziduhu, *Konsep Administrasi Dan Administrasi Di Indonesia*. Cet 2, (Jakarta: Bina Aksara, 2002), h. 56



bidang tata usaha yang dilaksanakan berdasar undang-undang yang berlaku.

Meliputi:

Administrasi Umum, adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Umum.

Berdasarkan pengertian tersebut dan apabila dikaitkan dengan aktifitas ditingkat Desa, maka berbicara tentang administrasi desa berarti yang dimaksud dengan "administrasi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemerintahan Desa untuk mencapai tujuan Pemerintahan, seperti antara lain, baik dalam menggerakkan partisipasi dalam pembangunan dan terwujudnya Demokrasi Pancasila secara nyata guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup>Simbolon, Marigan M, , *Dasar-Dasar Administasi Dan Manajemen*, (Jakarta: GhaliaIndonesia 2004), h.14

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

##### **A. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Hanauberak**

Desa Hanau Berak adalah merupakan Desa Tertua yang berada di Kecamatan Padang Cermin Dengan luas wilayah  $\pm$  1700 Ha, dinamakan Desa Hanau Berak yang berasal dari kata “Ham” Dan “Bekhak”, Ham” yang berarti Danau sedangkan “Bekhak” yang berarti lebar atau luas, Desa HanauBerak berdiri pada tahun 1920 yang telah dijabat oleh beberapa Kepala Desa.

Pada tahun 1883 ada empat pangeran dari paksipak Buay Nyekhupa Sekala Bekhak yaitu: Pertama Sultan Akbar di Lampung Barat, Kedua Pangeran Ting-Ting Pesawaran di Desa Hanauberak, Ketiga Raja Purba di Kota Agung bertempat di Desa Way Nipat, Keempat Raja Purba di Kalianda bertempat di Desa Canguh. Pada tahun tersebut ada 10 pendatang memasuki tanah Hanauberak yang masih dalam keadaan hutan belantara.

Sepuluh orang tersebut yaitu: Pangeran Ting-Ting, Ahmad Basri, Kodirman, Lukman Hakim, Mad Yani, Mat Abung, Latif, Abdul Manan, Zaki, dan Darmanto. Pada tahun tersebut Pangeran Ting-Ting yang berkedudukan sebagai Raja mengajak kesembilan temannya untuk membuka hutan belantara tersebut dan memberi nama kampung Bernuk lalu kampung tersebut diganti nama

dengan mengambil Hanauberak sehingganya saat ini DesaHanauberaktetap ada di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.<sup>52</sup>

Tepatnya pada tanggal 14April1962 DesaHanauberak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran ketika itu langsung diangkat oleh masyarakat sebagai kepala desa/lurah yaitu Bapak Yunada Ali Hasan (Batin Sukaria).<sup>53</sup> Penduduk DesaHanauberak terdiri dari beberapa suku yaitu: Lampung, Jawa, Sunda dan ogan, mayoritas penduduk yang ada yaitu dari Lampung Pesisir.

Desa Hanauberak dari awal terbentuk hingga saat ini sudah mengalami 11 kali pergantian Kepala Desa, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel-1 Urutan Pejabat Kepala Desa Hanau Berak

No	NAMA KEPALA DESA	TAHUN MEMERINTAH
1	M. Umar	ZamanBelanda
2	Jumahat	Zaman Belanda
3	Hj. Hasan	Zaman Belanda
4	Buang Petani	ZamanBelanda
5	Buang Zen	Zaman Jepang
6	M. Utan	Zaman Jepang
7	Yunada Ali Hasan	1962-1994
8	Zairi A. Kabul	1994-1999
9	Dahrumsyah	2000-2005
10	Ahmad Alamsyah	2005-2015

<sup>52</sup> M.Bahar, Tokoh Adat, *Wawancara Pribadi*, Hanauberak, 09- Desember-2015.

<sup>53</sup> *Dokumen Desa Hanauberak*

<b>11</b>	Mirza Gulam Ahmad	2015-2021
-----------	-------------------	-----------

Melihat data kepemimpinan Kepala Desa diatas dapat dipahami bahwa Kepala Desa yang memimpin berbeda-beda, akan tetapi terdapat Kepala Desa yang menjabat lebih dari satu periode, hal ini berarti dalam Kepemimpinan Kepala Desa tiap periode memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam menjalankan Pemerintahannya. “setiap Kepala Desa yang ada diatas merupakan penduduk asli dan bukan merupakan masyarakat pendatang yang masuk ke Desa Hanauberak”<sup>54</sup>.

**Tabel.2**

**Daftar Nama Aparatur Desa Hanauberak Kecamatan Padang Cermin  
Kabupaten Pesawaran**

NO	NAMA	JABATAN
1	Ramli M.A	Ketua LPM
2	M. Budi Santoso	Ketua BPD
3	Mirza Gulam Ahmad	Kepala Desa
4	Rudiyanto	Sekretaris Desa
5	Nasrudin	KAUR Pemerintahan
6	Iqbal Fernanda	KAUR Keuangan
7	Ahmad Suhaelli	KAUR Pembangunan

---

<sup>54</sup>Mirza Gulam Ahmad, *Kepala Desa Hanauberak*, Wawancara Pribadi, 16-Desember-2015.

8	Wawan Ifriza	KAUR Kesra
9	Efendi	KAUR Umum
10	Sayuti Ependi	Dusun I Hanau Berak Induk
11	Samsul Bahri	Dusun II Duakha
12	Nazmir	Dusun III Keroya Baru
13	Mis Rodin	Dusun IV Way Panas
14	Nasum	Dusun V Pematang Jambu
15	Sugino	Dusun VI Petai Jajar
16	Rohidin	Dusun VII Umbul Biluk
17	Abdul Hari	Dusun VIII Way Rilau

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran.

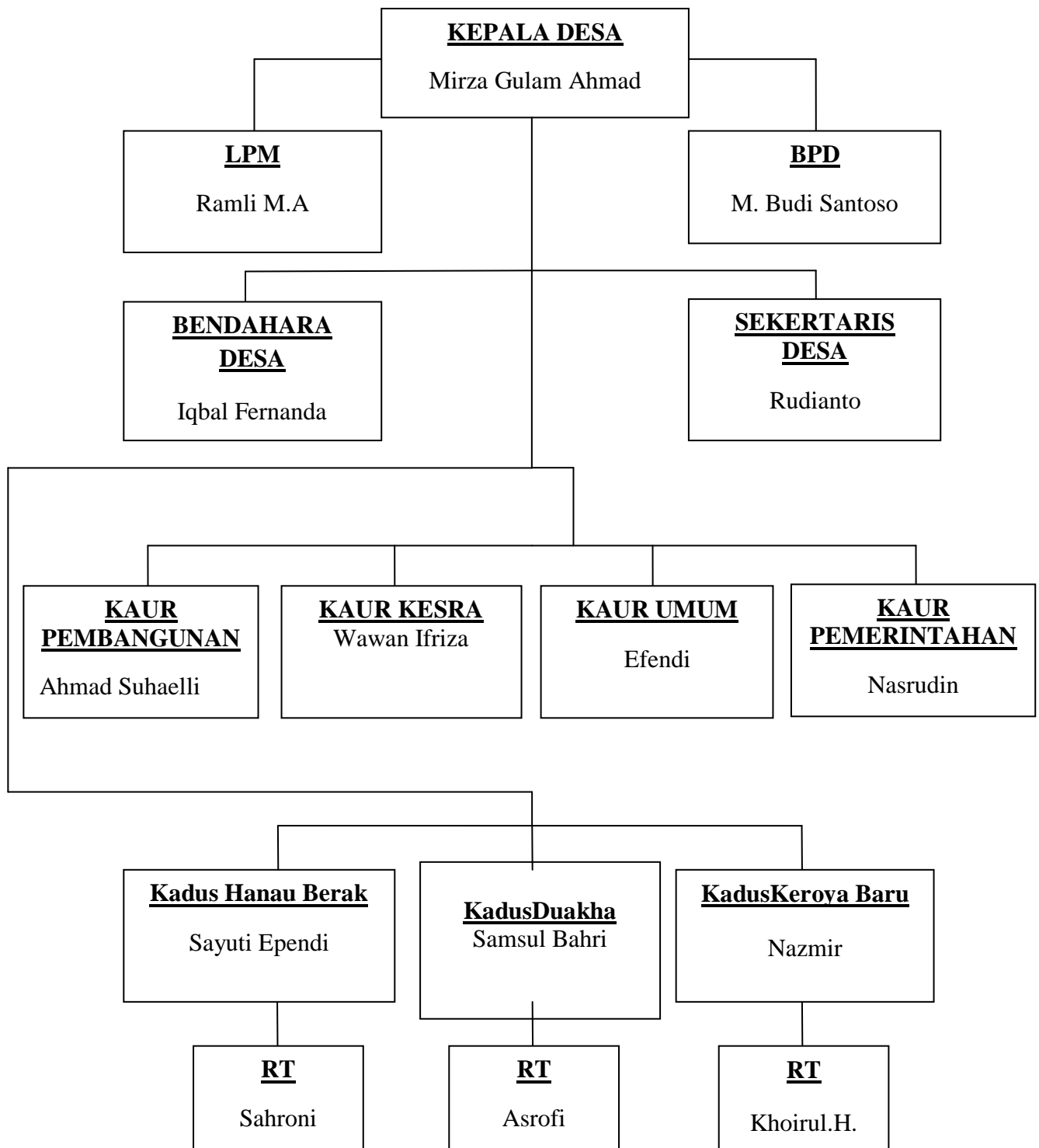
Nomor : 41 tahun 2012

Tanggal : 7 Desember 2012

Tentang :Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Hanuberak  
Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

**Bagan Struktur Pemerintahan Desa Hanauberak Kecamatan Padang**

**Cermin Kabupaten Pesawaran**





## B. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Hanauberak

Desa Hanauberak termasuk dalam wilayah Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, jarak dengan Ibukota Kecamatan 3 Km, sedangkan dengan jarak Ibukota Kabupaten 73 Km adapun Luas wilayah Desa Hanau Berak adalah 1700 Ha dengan jumlah penduduk 1624 kk, terdiri dari lahan sawah 350 Ha, ladang 600 Ha, pemukiman warga 400 Ha, lahan sementara yang tidak diusahakan 100 Ha.

Lahan perkebunan 250 Ha.<sup>55</sup> Topologi wilayah Desa Hanauberak sebagian besar merupakan hutan dan merupakan klasifikasi pedesaan. Mata pencaharian mayoritas adalah sebagai petani/pekebun. Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa, aparat desa tentunya saling berkoordinasi dengan Pemerintahan yang ada di atasnya baik yang berada di tingkat Kecamatan, Kabupaten, maupun Provinsi. Adapaun jarak atau orbitasi antar Pemerintahan sendiri dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel.3**

**Orbitasi.<sup>56</sup>**

No	Lembaga	Jarak (KM)
1	Dari Pusat Pemerintah Kecamatan	3 KM

---

<sup>55</sup>Buku Profil Desa/Kelurahan Hanauberak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, h. 10

<sup>56</sup>*Ibid.*, h.13

2	Dari Pusat Pemerintah Ibu Kota Kabupaten	73 KM
3	Dari Pusat Pemerintah Ibu Kota Provinsi	54 KM
4	Dari Pusat Ibu Kota Negara	485 KM

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa secara geografis wilayah Desa Hanauberek Kecamatan Padang CerminKabupaten Pesawaran terletak pada jarak 3 Km dari Pusat Pemerintahan Kecamatan, 73 Km dari Pusat Pemerintahan Ibu Kota Kabupaten, 54 Km dari Pusat Pemerintahan Ibu Kota Provinsi, dan 485 Km Dari Pusat Ibu Kota Negara.

Orbitasi atau jarak menunjukkan bahwa Desa Hanauberek merupakan Desa terpencil dariKecamatan Padang CerminKabupaten Pesawaran.Adapun batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Khepong JayaKecamatan Padang CerminKabupaten Pesawaran.
2. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Harapan Jaya Kecamatan Padang CerminKabupaten Pesawaran.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tambangan Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Banjaran KecamatanPadang Cermin Kabupaten Pesawaran.<sup>57</sup>

Syarat dalam terbentuknya sebuah Negara salah satunya adalah penduduk, penduduk adalah orang-orang yang berada didalam suatu wilayah yang terikat

---

<sup>57</sup>*Ibid.*, h.1

oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus menerus. Adapun jumlah penduduk Desa Hanauberak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel. 4**

**Penduduk Desa Hanauberak Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2015.**

<b>No</b>	<b>Golongan Umur</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
1	0-12 bulan	5	5	10
2	3-4 tahun	5	10	15
3	5-6 tahun	9	12	21
4	7-12 tahun	13	7	20
5	13-15 tahun	8	18	26
6	16-18 tahun	15	18	33
7	19-25 tahun	23	17	40
8	26-35 tahun	45	38	83
9	36-45 tahun	58	49	115
10	46-50 tahun	35	37	72
11	51-60 tahun	17	24	41
12	61-75 tahun	9	8	17
13	Lebih dari 76 tahun	7	5	12
<b>Jumlah</b>		<b>249</b>	<b>248</b>	<b>497</b>

Berdasarkan tabel diatas, secara jenis menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Hanauberak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran sendiri yaitu sebesar 497 jiwa yang terdiri dari 249 laki-laki dan 248 perempuan. Penduduk Desa Hanauberak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran juga merupakan salah satu elemen yang tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan Pembangunan Desa.

Bagi masyarakat Desa Hanauberak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran agama merupakan suatu identitas yang sangat melekat. Kondisi itu tercermin dari pola, gaya hidup, keyakinan, dan perilaku keagamaan dalam kehidupankesehariannya. Adapun agama yang dianut penduduk di desa Desa Hanauberak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran menganut agama Islam.

Walaupun masyarakatnya menganut agama Islam belum menjamin bahwa masyarakatnya mengamalkan ajaran-ajaran agama dengan sepenuhnya. Hal ini dapat dilihat pada aspek pengamalan ibadah dikatakan masih rendah contohnya seperti penerapan sholat berjamaah lima waktu di masjid bagi kaum laki-laki.

### **C. Kondisi Pelayanan Aparat Desa Hanauberak**

Penilaian pelayanan terhadap masyarakat tidak hanya diperuntukkan bagi karyawan swasta, melainkan juga bagi pegawai pemerintahan. Yang menjadi penelitian penulis adalah seluruh pemerintahan desa dan aparaturnya. Seorang aparat desa mempunyai tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Seperti yang dijelaskan undang-undangno6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Kepala Desa dan aparaturnya bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, membina kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>58</sup>Sebagai perangkat Pemerintahan Desa seharusnya aparat desa mampu memberikan pelayanan yang penuh dengan tanggung jawab dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Tidak hanya itu kepala desa juga mampu bekerjasama dengan baik bersama Pemerintah Kabupaten dan PemerintahProvinsidalam merelisasikan program Pemerintahan.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh penulis dapat dipahami bahwa masing-masing aparat desa yang ada di Desa Hanauberakmemiliki pengalaman pendidikan yang berbeda-beda sesuai dengan tingkatan pendidikan yang telah dilaluinya.Tentunya memiliki perbedaan terhadap pengalaman dari masing-masing aparat desa, karena setiap tahap pendidikan mengalami proses pembelajaran yang berbeda, yang akhirnya memiliki pengalaman dan pengembangan yang juga berbeda.

Hasil data yang diperolehpenulis menunjukan adanya beberapa hal yang menjadiahambatan aparatur desa selama satu periode menjabat sebagai perangkat Pemerintahan Desa. Diantaranya, keberhasilan desa dalam pelaksanaan Program Nasional Pembangunan Masyarakat (PNPM)Mandiri Pedesaan, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam laporan perkembangan pinjaman SPP, desa yang lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sehingga menjadi bahan evaluasi dalam

---

<sup>58</sup>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 Ayat 1

penyelenggaraan Pemerintahan Desa Hanauberak Kecamatan Padang  
Cermin Kabupaten Pesawaran.



## **BAB IV**

### **KEMAMPUAN PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA HANAUBERAK**

#### **A. Kepala Desa Dalam Mengelola Dana Desa Hanuberak**

##### **1. Perencanaan**

Dengan adanya Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 dan adanya Program dari Kementrian Desa (PDTT) diharapkan akan membuahkan hasil yang baik pada tatanan Pemerintahan paling bawah yaitu desa khususnya. Sedikit demi sedikit hasilnya sudah mulai terlihat dari program Kementrian Desa dimana pola pikir masyarakat perlahan mulai berubah lebih maju.

Banyak inspirasi atau usulan masyarakat yang tertuang dalam Musdes maupun Musdes. Semua dikarenakan Pemerintah Desa sudah mulai membuka diri terhadap masyarakat akan pentingnya musyawarah dan transparansi keuangan. Selain pola pikir masyarakat, administrasi di desa juga sudah mulai mengikuti aturan yang berlaku yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Dokumen yang dulu belum tertata rapih sekarang sudah mulai berubah lebih baik dalam penyusunannya. Untuk mendukung Pemerintah di masing-masing desa agar menyusun perencanaan pengelolaan dana desa yang dilaksanakan bersama antara perangkat desa Hanauberak, masyarakat, lembaga BPD pada tanggal 14 februari 2015 diantaranya merumuskan :

##### **a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan desa**

- Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Tambahan  
Penghasilan Perangkat desa

- Operasional Penyelenggaraan Pemerintah desa seperti; Operasional Perkantoran, Operasional Lembaga desa

**b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan desa**

- Pembangunan Drainase yang berlokasi di dusun Induk Hanauberak sepanjang 259m.
- Pembangunan rehab Jembatan Gantung 2 unit

**c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**

- Lomba Desa
- Ulang tahun desa Hanauberak
- Bulan bakti gotong royong
- Pelatihan Aparatur Pekon dan Lembaga desa
- Pembinaan Kegiatan PKK desa
- Penyusunan profil desa
- Pembinaan Posyandu Balita, Lansia dan Bumil

**d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

- Pelatihan peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah
- Pemberdayaan Kelompok Posyandu
- Pemberdayaan LPMD

**e) Kegiatan Prioritas Desa**

- Memberdayakan Masyarakat yang umumnya sebagai Petani
- Meningkatkan Penerapan Ilmu dan Teknologi Pertanian dan Peternakan Untuk Peningkatan Produksi serta mendorong perkembangan sistem dan usaha agrobisnis yang efisien modern, dan global.
- Pemerataan infrastruktur penunjang perekonomian Masyarakat

**2. Tahap Pelaksanaan, Pelaporan dan Evaluasi**

Setelah Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan, maka Tim Pelaksana ADD tingkat desa mulai melakukan kegiatan yang diawali dari penyusunan program kegiatan dana desa untuk penyelenggaraan pemerintahan dikelola oleh Tim Pelaksana Bidang Pemerintahan. Alokasi dana untuk pemberdayaan masyarakat dikelola oleh Tim Pelaksana Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Pemanfaatan dana desa sesuai dengan perencanaan telah mencapai realisasi, dalam bentuk pembangunan Drainase sepanjang 259M dan Rehab Jembatan Gantung 2 unit, di tetapkan rencana pembangunan desa karena Drainase merupakan sarana yang di pandang perlu dan akan memberikan manfaat besar untuk kesehatan lingkungan dan penanggulangan bahaya banjir.

Nilai pekerjaan untuk pembangunan Drainase ini berjumlah Rp. 132,100,999 berasal dari sumber dana desa yang telah terealisasi dan di evaluasi oleh Kementrian Desa melalui program P3MD, pemberdayaan masyarakat desa

bersama Inspektorat Kabupaten Pesawaran dari segi fisik pembangunan serta administrasi telah dinyatakan tidak bermasalah dan pembangunan dikatakan sesuai dengan pedoman teknis pelaksanaan.

Adapun penetapan rencana rehab jembatan gantung di letakan pada skala prioritas pada tahun anggaran 2015 dalam musyawarah desa karena beberapa alasan antara lain, Usia jembatan gantung sudah 6 tahun sehingga terdapat beberapa komponen material bangunan yang telah termakan usia dan rawan terhadap kerusakan sehingga dapat menimbulkan ketidaknyamanan bahkan membahayakan bagi para penggunanya, di samping itu jembatan penghubung desa ini merupakan sarana vital desa yang berfungsi sebagai penunjang lalu lintas orang dan barang yang dapat menggerakkan ekonomi masyarakat.

Rencana tersebut telah terealisasi tahun 2015 yang menggunakan dana sebesar Rp. 46.411.048. bersumber dari dana desa tahun anggaran 2015 setelah di evaluasi dan di inspeksi oleh pihak terkait baik dari desa maupun dari instansi yang berwenang dalam hal ini kementrian desa dan inspektorat Kabupaten dinyatakan tepat guna sesuai sasaran dan dalam pelaksanaan telah memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun pelaporan kedua kegiatan yang dimaksud dapat dilihat dalam lampiran chart table, mekanisme pelaporan seperti terlihat dalam table sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan standar operasional prosedur

pengelolaan dana desa yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015.

Seluruh kegiatan yang didanai oleh anggaran dana desa dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa. Seluruh kegiatan sudah dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## **B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat**

Dana Desa pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan hingga sampai ke Desa melalui pembangunan infrastruktur yang ada di Desa, memajukan perekonomian Desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat.

### **1. Faktor Pendukung**

Diantara faktor pendukung dalam pengelolaan pembangunan desa adalah perangkat desa yang masih di golongan berusia muda dan produktif, kondisi birokrasi yang sinergi, adanya potensi alam berupa gunung batu untuk bahan material fisik pembangunan, adanya sumber perairan dan aliran sungai yang memadai, terdapat tanaman kayu yang berguna untuk material jembatan gantung serta kondisi masyarakat yang beraneka suku dan agama namun tetap rukun dalam bermasyarakat

## 2. Faktor Penghambat

Sesuai hasil wawancara kepada Aparatur Desa bahwa yang menjadi hambatan pembangunan yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi, kemudian kurang lengkapnya sarana dan prasarana yang ada di Desa. Hambatan aparatur desa sendiri ialah minimnya SDM yang peduli terhadap pembangunan desa tersebut.<sup>59</sup> Sementara hasil dari wawancara kepada masyarakat, mereka menyebutkan bahwa yang menjadi tantangan dan hambatan jalannya pelaksanaan pembangunan Dana Desa yaitu sumber daya aparatur dan kurang lengkapnya sarana dan prasarana yang ada di Desa Hanauberak.<sup>60</sup>

Sekdes di pindahkan tugasnya menjadi bendahara kecamatan hingga di lantik secara resmi, sehingga mengalami kekosongan Sekdes dalam struktural desa selama 7 bulan. Lebih rinci dapat diuraikan yang menjadi hambatan aparatur desa terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Hanauberak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

### 1. Sumber Daya Aparatur Desa

Sumber daya manusia merupakan alat ukur untuk memberikan hasil kerja yang optimal kepada masyarakat oleh karenanya sangat dibutuhkan aparatur Pemerintah sehingga memiliki kualitas sumber daya manusia yang handal, untuk itulah dapat dikatakan keberhasilan suatu pelayanan salah satu sangat dibutuhkan

---

<sup>59</sup> Ahmad Suhaelli, Kaur Pembangunan Wawancara Pribadi Tanggal 13-Oktober-2016.

<sup>60</sup> Rozali, Zakir, Fadlan (Warga Hanauberak), Darman, Narsum, Aminudin (Warga Hanauberak) Mustamir, Rudi, Rohim, (Warga Kroya Baru), Wawancara Pribadi Tanggal 14-07 Oktober 2016.



oleh kualitas aparat yang ditunjuk sebagai penyelenggara pembangunan desa.<sup>61</sup> pada tahun 2015 pelaksanaan Dana Desa belum adanya aturan pelaksanaan penyelenggaraan Dana Desa yang di terapkan Desa Hanauberak

Peraturan Bupati, Permendes mengenai sosialisasi dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait, karena belum sampainya sosialisai aturan tersebut serta belum adanya aparat desa yang mengikuti pelatihan secara khusus terkait teknis pelaksanaan Dana Desa.<sup>62</sup>

Kemudian Sekdes di tarik oleh Kecamatan, sehingga Tim Pelaksana Kerja Dana Desa memakai acuan ADD tahun sebelumnya. Masyarakat mengharapkan aparatur desa mempunyai kreatifitas dalam pelaksanaan tugas senantiasa mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.<sup>63</sup>

Sumber daya aparatur ini bukan hanya penghambat jika aparturnya tidak memiliki kemampuan dan kreatifitas, apa lagi dalam hal pelayanan pelaksanaan Dana Desa bukan hanya kemampuan keilmuan atau wawasan saja yang harus dimiliki tetapi kemampuan dalam melayani, melaksanakan pembangunan dan merangkul masyarakat harus dimiliki.

## 2. Kesadaran Masyarakat dan Lembaga Desa

Salah satu yang turut mempengaruhi pelaksanaan tugas pelayanan Dana Desa aparatur Desa Hanauberak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten

---

<sup>61</sup> Darmansyah, Anggota BPD, Wawancara Pribadi Tanggal 09 Oktober 2016.

<sup>62</sup> Iqbal Fernanda, Bendahara Desa Hanauberak, Wawancara Pribadi Tanggal 10 Oktober 2016.

<sup>63</sup> Nasrudin, Kaur Pemerintahan Hanauberak, Wawancara Pribadi Tanggal 10 Oktober 2016.

Pesawaran adalah kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat disini adalah kesadaran untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program Dana Desa, relasi antara aparat Pemerintahan dengan masyarakat memang harus saling mendukung agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan, baik itu dari pihak masyarakat maupun dari aparatur Pemerintahan Desa itu sendiri.<sup>64</sup>

Sesuai hasil wawancara kepada kepala dusun Pemetang Jambu Desa Hanauberak Nasum bahwa “untuk pelayanan pembangunan Dana Desa adanya beberapa masyarakat dan anggota BPD yang tidak hadir pada saat musrenbang sehingga tidak mengetahui informasi yang utuh karna tidak aktif memenuhi undangan desa.”<sup>65</sup>

Keadaan seperti ini merupakan kurangnya kesadaran masyarakat dan anggota BPD bagaimana menciptakan kerja sama antara aparatur desa dengan saling terlibat. Sebaliknya jika mereka benar sadar tanpa ada paksaan maka akan menciptakan hubungan atau kerja sama yang baik antara aparatur desa dengan warga masyarakat.

### 3. Sarana dan Prasarana

Salah satu hambatan aparatur desa dalam pelaksanaan pembangunan Dana Desa Hanauberak adalah sarana dan prasarana yang masih kurang memadai. Seperti adanya sarana yang dapat di pakai untuk pelayanan beraneka ragam jenis dan fungsinya dapat membantu pengelolaan program begitu juga pelaksanaan di lapangan memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih efisien dan efektif.

---

<sup>64</sup> Rudianto. Sekdes Hanauberak, wawancara pribadi tanggal 04 November 2016.

<sup>65</sup> Nasum. Kadus Pematang Jambu Desa Hanauberak, Wawancara Pribadi Tanggal 07 Oktober 2016.

Untuk itu sarana dan prasarana dapat dikatakan sebagai faktor pendukung dikarenakan dapat membantu proses pengelolaan, begitu pula sebaliknya, jika sarana dan prasarana kurang memadai maka bisa menjadi penghambat prosedur pengelolaan. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan dari Sekertaris Desa Hanauberak bahwa “ Desa Hanauberak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

Adanya beberapa fasilitas pendukung Desa dan perangkat administrasi yang tidak dapat dipakai untuk proses kerja Pengelolaan Dana Desa, seperti kantor desa belum milik sendiri masih menempati salah satu rumah warga, untuk peralatan dan perlengkapan lainnya, meja dan kursi, komputer satu buah, printer satu buah, belum adanya jaringan internet dan peralatan yang ada di rumah sekertaris Desa masih kurang menunjang jalannya pelayanan.<sup>66</sup>

Ketiga poin diatas antara sumber daya aparatur, kesadaran masyarakat dan Lembaga Desa dan sarana dan prasarana tidak jauh berbeda. Suatu program dapat berjalan dengan baik dan meningkat jika tiga poin tersebut saling mendukung. Sejalan dengan kehidupan masyarakat akan pelaksanaan program Dana Desa yang berkualitas dari Pemerintahan Desa, maka sebagai Pemerintah yang mendapat kepercayaan dari masyarakat, perlu ada media yang tepat dan menarik agar masyarakat bisa melihat dan memahami apa yang telah dilakukan Desa dalam penggunaan anggaran desa.

Dalam penelitian Kemampuan Kepala Desa Dalam Mengelola Dana Desa Di Desa Hanauberak ,Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran , teori

---

<sup>66</sup> Efendi, Kaur Umum, Wawancara Pribadi Tanggal 19 Januari 2017

yang digunakan untuk membedah permasalahan pada penelitian ini adalah teori Implementasi Kebijakan menurut George C. Edward<sup>67</sup>. Ada empat indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adapun hasil analisis pada kemampuan pengelolaan Dana Desa yang dikelola oleh pemerintah Desa Hanauberak yang mengacu pada empat indikator yakni :

#### 1. Komunikasi

Indikator komunikasi dalam penelitian ini diukur dari bagaimana komunikasi yang terjalin antara pemerintah Desa dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, pendamping desa, kecamatan, begitu pula komunikasi antara pemerintah Desa dengan masyarakat. Adapun pengukuran terhadap indikator komunikasi.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan masih adanya kekurangan dalam penyaluran komunikasi baik dari Kabupaten ke Desa maupun dari Kecamatan ke Desa. Karena banyaknya tingkat birokrasi ini kadang dalam prosesnya terjadi penyampaian yang salah sehingga apa yang menjadi tujuan dan maksud kebijakan tidak tersampaikan pada tingkat Desa.

Selain itu sosialisasi juga dilakukan melalui baliho yang berisikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tahun tersebut yang di tempel di

---

<sup>67</sup> Soenarko, H, : *Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*. (Surabaya : Airlangga University Press, 2003)

kantor Desa. Namun sesuai pengamatan peneliti melihat baliho tersebut tidak semua masyarakat mengetahui dikarenakan masyarakat desa juga kurang perhatian dalam membaca baliho tersebut sehingga tidak mengetahui anggaran dana yang ada di desa.

#### a) Kejelasan

Kejelasan merupakan kejelasan perintah dan komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan. Kebijakan harus disampaikan dengan jelas agar para pelaksana, target, maupun pihak yang berkepentingan tahu mengenai maksud dan tujuan dari kebijakan. Dalam hal ini peneliti menemukan adanya suatu permasalahan yaitu informasi yang diberikan oleh pihak diatas desa yaitu dalam hal ini Kecamatan, Dinas PMD, dan Inspektorat sebagai lembaga yang mempunyai tugas berkoordinasi dengan desa masih kurang jelas.

Hal ini terjadi sehingga aparatur desa sering mengalami kebingungan terkait program-program apa saja yang mereka harus buat di desa dari Dana Desa ini. Komunikasi yang kurang jelas ini terjadi karena pada tingkat birokrasi di atas desa (Kecamatan, Dinas PMD, dan Inspektorat) masih kurang dalam memahami aturan yang berlaku sehingga terjadi interpretasi atau tafsir-tafsir sendiri terhadap peraturan.

Artinya dalam hal ini baik Kecamatan, Dinas PMD, dan Inspektorat mempunyai pemahaman yang berbeda dalam mengartikan Undang- Undang itu sendiri sehingga informasi yang diterima oleh desa pun menjadi berbeda- beda antara satu dan yang lainnya kemudian di tambah dari hasilwawancara kepada

kepala desa belum adanya aparat yang di undang pelatihan secara khusus terkait pelaksanaan dana desa.<sup>68</sup>

## 2. Sumber Daya

Indikator sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, baik itu sumber daya manusia, finansial maupun sarana dan prasarana yang mendukung terwujudnya keberhasilan kebijakan anggaran dana desa. Untuk mengukur seberapa efektif penggunaan sumber daya pada pelaksanaan kebijakan anggaran dana desa , digunakan beberapa sub indikator berikut ini :

### a. Staff (Sumber Daya Manusia).

Staf merupakan sumber yang sangat penting dalam melaksanakan kebijakan. Dalam wawancara dengan staf desa masalah SDM dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Hanauberak ini adalah keahlian yang dimiliki oleh aparatur masih kurang maksimal dalam pengelolaan anggaran maupun keahlian dalam penggunaan komputer sehingga proses pelaksanaan program menjadi agak lama terselesaikan karena aparatur masih sambil belajar dan kurang ahli baik dalam pengelolaan maupun dalam mengoperasikan komputer.

### b. Informasi.

Informasi merupakan sumber kedua yang penting dalam pengelolaan. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti di Desa Hanuberak yaitu

---

<sup>68</sup> Mirza Gulam Ahmad. Kepala Desa Hanauberak, Wawancara Pribadi Tanggal 08 Oktober 2016.

karena pada tahap komunikasi yang kurang jelas otomatis informasi mengenai pengelolaan anggaran dana desa ini masih kurang. Dalam hal ini aparaturnya masih belum paham dan mengerti mengenai cara pengelolaan dana, cara pembuatan RAB, dan membuat SPJ. Sehingga dalam pelaksanaan kebijakan masih mengalami hambatan karena informasi terkait tata cara pelaksanaan kebijakan itu belum diketahui dengan jelas oleh aparaturnya desa, sehingga mereka mengambil alternatif dengan mengacu pada anggaran tahun sebelumnya.

#### c. Wewenang

berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan. Wewenang dalam hal ini diukur berdasarkan bagaimana pelaksana menjalankan kewenangannya dengan sebaik-baiknya. Kewenangan dalam pengelolaan dana desa ini desa yang dipimpin oleh kepala desa memiliki wewenang penuh dalam pembentukan APBDesa dan pengelolaan dana desa secara penuh menjadi kewenangan desa. dan aparaturnya desa sebagai pembantu kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan memiliki wewenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan yang dirancang di APBDesa.

#### d. Fasilitas

Disini fasilitas yang dimaksud adalah alat-alat yang menunjang pelaksanaan program penunjang inovasi online seperti komputer, scanner, aplikasi dan jaringan elektronik (wifi). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di kantor desa Hanauberak terdapat satu buah komputer dan kaur difasilitasi dua buah laptop untuk digunakan secara bergantian. Selain itu juga

ada satu buah printer dan scanner. Namun untuk jaringan wifi masih belum ada di kantor desa Hanauberak.

### 3. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Selain komunikasi dan sumber daya, Disposisi (sikap pelaksana) juga menjadi faktor penting bagi keberhasilan suatu kebijakan publik. Apabila para pelaksananya tidak memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugasnya, maka kebijakan tersebut juga diyakini tidak akan berhasil. Terdapat beberapa sub indikator berikut ini :

#### a. Pengangkatan Birokrat.

Pengangkatan tim pelaksana yang memiliki dedikasi tentunya berpengaruh terhadap sikap dari pelaksana itu sendiri. Pada kebijakan anggaran dana desa penulis melihat bahwa kepala desa secara langsung menunjuk siapa saja orang-orang yang menangani dana desa itu sendiri dan secara langsung pula menunjuk orang-orang siapa saja dalam struktur organisasi Desa. Seperti halnya juga dalam pengangkatan pegawai yang dilaksanakan pada tahun 2016 yaitu tidak adanya rekrutmen secara resmi dari desa. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa tidak ada transparansi dalam pengangkatan pegawai karena kepala desa mengambil langsung pegawai yang dikenalnya dan tidak melalui tes secara resmi.



#### b. Insentif

Insentif merupakan pemberian keuntungan kepada pelaksana kebijakan untuk meningkatkan disposisi aparatur terhadap kebijakan. Dalam melaksanakan pengelolaan anggaran dana desa ini insentif yang diberikan kepada aparatur desa dirasa masih kurang dan belum sesuai dengan tanggung jawab dan beban kerja yang aparatur desa terima. Para pegawai hanya dapat gaji pokok dan gaji tunjangan jabatan dan tidak dapat tunjangan kinerja. Walaupun jumlah gaji dengan beban kerja masih belum sesuai tetapi aparatur desa tetap menjalani kewajiban dan tanggungjawabnya sesuai dengan jabatan yang dimiliki.

#### 4. Struktur Birokrasi

Suatu kebijakan publik tidak hanya melibatkan satu orang saja tetapi melibatkan banyak orang termasuk juga banyak pihak. Dalam pelaksanaan pengelolaan terjadi kekosongan Sekretaris Desa selama 7 bulan karena di angkat oleh Kecamatan sebagai Bendahara Kecamatan Padang Cermin sehingga desa mengalami kebingungan ketika membuat pelaporan yang terkait dengan administrasi oleh sebab itu, diperlukan suatu struktur birokrasi yang lengkap dan tidak lemah agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik dan berhasil.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengelolaan Dana Desa Hanauberak diantaranya yaitu :
  - a. Bahwa kepala desa hanauberak beserta seluruh stakeholder dalam pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi, sudah sesuai sasaran dan telah memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Terdapat kekurangan sarana dan prasarana aparatur desa Hanauberak dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa.
  - c. Minimnya SDM baik aparatur desa itu sendiri dan masyarakat desa Hanauberak sehingga kesadaran sebagai control sosial pada pengoptimalisasian pembangunan desa kurang.
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat pengelolaan dana desa Hanauberak :
  - a. Faktor pendukung dalam pengelolaan pembangunan desa adalah adanya Undang-Undang No 6 tahun 2014 terkait dana desa, adanya tradisi adat lokal daerah, terdapat potensi pariwisata seperti air terjun dan puncak, perangkat desa yang masih berusia muda dan produktif, kondisi birokrasi yang sinergi, adanya potensi alam berupa gunung batu untuk bahan material fisik pembangunan, adanya sumber perairan

dan aliran sungai yang memadai, terdapat tanaman kayu yang berguna untuk material jembat gantung serta kondisi masyarakat yang beraneka suku dan agama namun tetap rukun dalam bermasyarakat.

- b. Faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa adalah Sumber Daya Aparatur Desa masih dikatakan minim keilmuan dan pengalaman di bidang pengelolaan dana desa. Peraturan Bupati, Permendes mengenai sosialisasi dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa belum tersosialisasi sampai ke desa serta belum adanya aparat desa yang mengikuti pelatihan khusus terkait teknis pelaksanaan pengelolaan dana desa. Kesadaran Masyarakat dan Lembaga Desa untuk berperan aktif dalam pembangunan masih kurang serta Sarana dan Prasarana desa masih belum terpenuhi seluruhnya.

## **B. Saran**

1. Untuk menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dalam mengoptimalkan pembangunan desa diharapkan untuk :
  - a. Sebaiknya Pemerintah Daerah mengadakan pelatihan secara berkala kepada aparatur desa sesuai dengan tugasnya masing-masing agar aparat desa yang mengemban amanat dapat menjalankan dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan kemampuannya.
  - b. Aparatur desa meningkatkan kualitas SDM dari masyarakat dan aparat desa itu sendiri agar masyarakat mampu menjadi control yang baik.

2. Agar dapat bekerja dengan optimal maka perlu dilaksanakan kerjasama antar aparat dan masyarakat yaitu :
  - a. Pemerintah harus lebih bekerja keras untuk mensosialisasikan tentang program-program dan lebih transparansi kepada masyarakat tentang prosedur dan pelaksanaan pemanfaatan dana desa sehingga masyarakat dapat memahami dengan baik.
  - b. Masyarakat harus lebih memahami dan memperhatikan prosedur dalam memperoleh pelayanan dan ikut terlibat. Sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dan bekerjasama dalam pembangunan di Desa Hanauberak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.
  - c. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya dan dapat dikembangkan lebih lanjut demi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu tentang Pemikiran Politik Islam.
  - d. Penelitian ini sebagai langkah awal untuk memberi pemahaman kepada masyarakat khususnya masyarakat Hanauberak tentang tatakelola dana desa dan dapat diperdalam, diperluas dengan penelitian-penelitian serupa di masa mendatang dan di tempat lain dalam masalah yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas S.Ziyad, *Pilihan Hadits Politik, Ekonomi & Sosial*, Jakarta, Pustaka Panjimas, 1991.
- Abdul Chaer, *Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Agus Dwiyanto, *Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan Dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, 2003.
- Alma, Bukhori. Harlasgunawan. *Hakikat Dasar Studi Sosial*, Bandung: CV. Sinar Baru, 1987.
- Antono Herry, “*Kesiapan Desa Menghadapi Implementasi Undang-Undang Desa Tinjauan Desantralisasi Fiskal Dan Peningkatan Potensi Desa*”. *Jurnal Ilmiah Civis*, Vol. 5.
- Argama, Rizki, *Konstitusi Dan Pemerintahan*, Yogyakarta: Media Perkasa, 2006.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2005.
- Budiarjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Buku Profil Desa/Kelurahan Hanauberak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.
- Cholid Nurboko dan Ahmadi, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1997.
- Desa <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/03/25/dana-desa-guna-pembangunan-indonesia-yang-lebih-baik>.

Franz Magnis Suseno, *Kuasa Dan Moral*, Jakarta: Gramedia, 1986.

Hikmat, Harry. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Humaniora Utama Press, 2004.

Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, Cetakan Ke Empat, Edisi III, 2002.

Kartini Kartono, *Pengantar Metode Penelitian Riset Sosial.*, Bandung: Mandar Maju, 1996.

Kencana Syafei inu, *Al Qur`an dan Ilmu Politik*, Jakarta, Rineka Cipta, 1996.

Koenjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Edisi ke III, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 1983.

Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1988.

Liang Gie, The, *Kamus Administrasi*, Jakarta: PT Gunung Agung, 2001.

Lukman, Sampara. *Manajemen Kualitas Pelayanan*, Jakarta: STIA-LAN Press, 2005. Basri Amaluddin, *Administrasi Pembangunan Untuk Pembangunan Desa*, Bekasi: Akademi Pembangunan Desa. 1982.

M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2002.

Ndraha, Taliziduhu, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Ndraha, Taliziduhu, *Konsep Administrasi Dan Administrasi Di Indonesia*. Cet 2, Jakarta: Bina Aksara, 2002.

- Nurcholis, Hanif , *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Rahardjo, *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999.
- Rosalinda, LPD, Okta. "*Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan*". *Artikel Jurnal*, V. 3, No. 7
- Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Silalahi, Ulbert, *Studi Tentang Ilmu Administrasi*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007.
- Simbolon, Marigan M, , *Dasar-Dasar Administasi Dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia 2004.
- Soenarko, H, : *Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*, Surabaya: Airlangga University Press, 2003.
- Subiakto Henry, Ida Rachmah . *Otonomi , Dan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2012.
- Sudjoko, dkk., *Pendidikan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2010
- Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suja'i, *Inovasi Pembelajaran Bahasa*, Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1, Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM 1982.

Usman Husain, Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.

V Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa Panduan Tatakelola Keuangan Desa*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.

Visi Yustisia *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*, Jakarta: Visimedia, 2015.

Widjaja, AW, *Pemerintahan dan Administrasi Desa*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Widjaja, HAW, *Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.



## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Hanauberak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran

*Lampiran***Daftar Nama Informan**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Kedudukan</b>
1.	Mirza Gulam Ahmad	Kepala Desa Hanauberak
2.	Rudianto	Sekretaris Desa Hanauberak
3.	Suparyo	Masyarakat Umbul Biluk
4.	Dahrumsyah	Tokoh Adat Hanauberak
5.	Toni	Masyarakat Petaijajar
6.	M. Budi Santoso	Ketua BPD Hanauberak
7.	Joni Irawan	Masyarakat Umbul Biluk
8.	Desta Irawan	Masyarakat Hanauberak
9.	Zakir	Masyarakat Duakha
10.	M. Nasuha	Masyarakat Duakha
11.	M. Nuri	Masyarakat Waypanas
12.	Daud	Masyarakat Kroya Baru
13.	Iqbal Fernanda	Kaur Keuangan Hanauberak
14.	Muslim Affandi	Masyarakat Hanauberak
15.	Rozali	Masyarakat Waypanas
16.	Wardana	Masyarakat Wayrilau
17.	Saprijal	Masyarakat Kroya Baru

**LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN**







